



HASIL PEMBAHASAN DESK PROSN/TEMATIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **05** Bulan **Maret** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani ProSN/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Krishna Wardhani	197308112010012002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kementerian Dalam Negeri
2	Maya Septiyana	19820920 200801 2 007	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KPPPA
3	Muhammad Zul Fauzi Sinapoy	199204212015121001	Perencana Ahli Pertama	Dit. KPPA Bappenas
4	HARMITA, S.K.M., M.M	19770207 199903 2 003	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROV KALTENG
5	Suryanto, A.Ks., M.Si	197301081994031006	Sekretaris	DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROSN/TEMATIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATIK	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.412	
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.412	



NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATI K	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.412	
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.412	
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.412	
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	



NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATI K	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	15000
Catatan Pembahasan : 1. Daerah melaksanakan Sub kegiatan 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dengan target tahun 2027 sebanyak 15.000 peserta didik dengan pagu Rp. 22.500.000.000 Pusat sepakat dengan usulan daerah 2. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas perlu ada analisis situasi peserta didik di Kalimantan Tengah 3. Untuk target penerima sub kegiatan ini harus mempertimbangkan kelompok yang tertinggal di dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan sekolah menengah atas 4. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender					
2.	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	15000
Catatan Pembahasan : 1. Daerah melaksanakan Sub kegiatan 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dengan target tahun 2027 sebanyak 15.000 peserta didik dengan pagu Rp. 22.500.000.000 Pusat sepakat dengan usulan daerah 2. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas perlu ada analisis situasi peserta didik di Kalimantan Tengah 3. Untuk target penerima sub kegiatan ini harus mempertimbangkan kelompok yang tertinggal di dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan sekolah menengah atas 4. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender					

2. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	6
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan target disesuaikan menjadi 6 Dokumen dan pagu sebesar Rp. 900.000.000 2. Agar memperhatikan UU 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan 3. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak perlu ada analisis situasi pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kalimantan Tengah 4. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender 5. Dokumen berorientasi pada outcome perlu dipastikan dokumen berbasis analisis angka kematian ibu kematian bayi, stunting dan diharapkan untuk memetakan kelompok rentan					
2.	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	6
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan target disesuaikan menjadi 6 Dokumen dan pagu sebesar Rp. 900.000.000 2. Agar memperhatikan UU 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan 3. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak perlu ada analisis situasi pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kalimantan Tengah 4. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender 5. Dokumen berorientasi pada outcome perlu dipastikan dokumen berbasis analisis angka kematian ibu kematian bayi, stunting dan diharapkan untuk memetakan kelompok rentan					

3. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : ab30b24153f8453da69bc522a2de937d
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 05 March 2026
Jam : 9:01:55 AM

1.	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja dengan target disesuaikan sebanyak 30 orang dan pagu disesuaikan sebesar Rp. 500.000.000 2. Untuk target penerima sub kegiatan ini harus mempertimbangkan kelompok yang tertinggal di dalam kesempatan kerja 3. Untuk target penerima sub kegiatan ini agar mempertimbangkan kepada perempuan untuk mendapatkan kesempatan kerja 4. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender 5. Materi sosialisasi untuk CPMI terkait pengasuhan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak					
2.	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja dengan target disesuaikan sebanyak 30 orang dan pagu disesuaikan sebesar Rp. 500.000.000 2. Untuk target penerima sub kegiatan ini harus mempertimbangkan kelompok yang tertinggal di dalam kesempatan kerja 3. Untuk target penerima sub kegiatan ini agar mempertimbangkan kepada perempuan untuk mendapatkan kesempatan kerja 4. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender 5. Materi sosialisasi untuk CPMI terkait pengasuhan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak					

4. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Lembaga	25
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 2.08.02.1.01.0013 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi dengan target tahun 2027 disesuaikan sebanyak 25 lembaga dan Pagu sebesar Rp 10.000.000 2. Pemilihan lembaga dari lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan capaian indikator pembangunan kesetaraan gender (IKG dan IPG) 3. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender 4. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi harus sesuai dengan kebijakan nasional dan pedoman terkait PUG yang telah diterbitkan					
2.	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Lembaga	25
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 2.08.02.1.01.0013 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi dengan target tahun 2027 disesuaikan sebanyak 25 lembaga dan Pagu sebesar Rp 10.000.000 2. Pemilihan lembaga dari lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan capaian indikator pembangunan kesetaraan gender (IKG dan IPG) 3. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender 4. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi harus sesuai dengan kebijakan nasional dan pedoman terkait PUG yang telah diterbitkan					

5. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.17.07.1.01.0020	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	30
Catatan Pembahasan : 1. Daerah melaksanakan sub kegiatan 2.17.07.1.01.0020 Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha, dengan target sebanyak 30 Orang dan pagu sebesar Rp. 45.000.000 (target dan pagu akan disesuaikan dengan kemampuan daerah) 2. sub kegiatan ini ditargetkan untuk mendorong pembentukan badan hukum untuk usaha bagi pelaku usaha perempuan 3. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender					
2.	2.17.07.1.01.0020	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	30
Catatan Pembahasan : 1. Daerah melaksanakan sub kegiatan 2.17.07.1.01.0020 Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha, dengan target sebanyak 30 Orang dan pagu sebesar Rp. 45.000.000 (target dan pagu akan disesuaikan dengan kemampuan daerah) 2. sub kegiatan ini ditargetkan untuk mendorong pembentukan badan hukum untuk usaha bagi pelaku usaha perempuan 3. Subkegiatan ini harus dilengkapi dengan analisis gender melalui ToR/KAK yang responsif gender					



IV. RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	1
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk ProSN/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

